

**DETERMINASI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI RSUD WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Yusuf Sudantoko

NIM: 18.227.146

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2024**

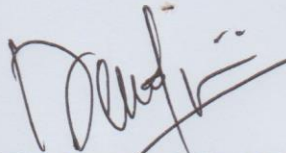
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Yusuf Sudantoko
NIM : 18.22.7146
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Disetujui dan disahkan:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Januari 2024

Pembimbing



Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si.
NIDN. 060710901

Mengerahui,
Wakil Ketua I
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Aditya Liliyan, S.MB., M.M.
NIDN. 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yusuf Sudantoko
NIM : 18.22.7146
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di
RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan memenuhi gelar Sarjana Akuntansi

Pada Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2024

Tim Penguji

Tanda Tangan

Penguji 1 : Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si.

(.....)

Penguji 2 : Era Trianita S. S.E., M.Si., M.B.A.

(.....)

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

IDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI RSUD WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagai tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar, dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 2 April 2024

Pembuat pernyataan,



Yusuf Sudantoko

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Orang tua saya yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang yang tidak dapat diukur, dan selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materil serta semangat yang tidak ada hentinya.
2. Adik saya yang membantu dalam semangat dan doa agar kakaknya cepat lulus kuliah.
3. Keluarga besar yang memberikan dukungan semangat kepada saya untuk menyelesaikan/menempuh pendidikan selama ini.
4. Seluruh Staff Pengajar dan Administrasi STIE Surakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan dalam melanjutkan pendidikan.
5. Instansi saya RSUD Wonosari yang telah banyak membantu baik moral, maupun izin dalam melakukan penelitian dalam proses pembuatan skripsi.
6. Teman-temanku baik di desa maupun di kantor yang selalu memberikan dukungan dan support dalam menyelesaikan pendidikan.

MOTTO

“Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban
Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan”
(Q.S Ar-Rahman)

“Lelahkan badanmu untuk hal yang berguna, jika lelahmu itu untuk hal yang
berguna, insya allah lelahmu itu menjadi lillah,
dan insya Allah membawa berkah”
(Gus Iqdam)

“Jangan lupa selalu berikhtiar disertai dengan doa dan saat ikhtiar sudah digaris
batas, maka biarkan doa yang akan bertarung diatas langit”

“Terkadang urip iki koyo balap karung, yo njungkel, yo keserimpet, yo kadang
kesandung, nanging kudu iso tagi lan ora perlu disambati”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh karena rahmat hidayahNya dan AnugrahNya, serta kemurahan hatiNya yang besar kepada kita sehingga penelitian dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul”.

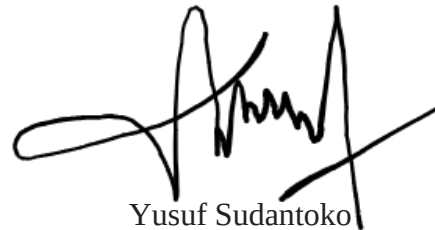
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi pada program Strata Satu (S1) Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan saran, motivasi, dan ilmu yang berharga selama penyusunan skripsi.
4. Seluruh jajaran Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang berguna serta dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.
5. Seluruh staf karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian dalam pendidikan.
6. Orang tua dan keluarga tersayang yang selalu memberikan dukungan baik moral dan materil, serta kasih sayang yang tidak dapat diukur kepada penulis.
7. Bapak Sumartana, SKM, M.MR selaku Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Wonosari yang telah memberikan izin penelitian serta membantu dalam proses pembuatan skripsi.
8. Seluruh teman kerja unit Aset yang telah banyak memberikan dukungan dan doa dan membantu dalam penyelesaian skripsi.

9. Seluruh teman-teman Sor Jati (SJ) yang telah memberikan semangat menghina yang bertujuan agar kami cepat dalam menyelesaikan skripsi
10. Teman-teman seperjuangan dari angkatan 2016-2020 yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian pendidikan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, kiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Sukoharjo, 2 April 2024



Yusuf Sudantoko

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Lingkup Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Teori Yang Relevan	12
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Hipotesis	32

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Objek Penelitian.....	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Definisi Operasional Variabel.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	50
B. Karakteristik Responden	52
C. Analisis Data	53
D. Pembahasan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	277
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Skala Likert	40
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel Independen	41
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel Dependen	42
Tabel 4.1 Daftar Karakteristik Responden.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.8 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Uji Normalitas	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.10 Uji Glejser	655
Tabel 4.11 Hasil Analisis Linier Berganda	666
Tabel 4.12 Hasil Uji F	69
Tabel 4.13 Hasil Uji t	70
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	711

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD (2018-2021)	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	311
Gambar 4.1 Struktur Organisasi RSUD Wonosari Wonosari.....	51
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas.....	600
Gambar 4.3 Grafik Normal Probability-Plot Uji Normalitas.....	611
Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot.....	644

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul, determinasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder dengan pengambilan data menggunakan kuisioner/*google form* dibagikan pada responden. Populasi dalam penelitian ini seluruh pegawai di RSUD Wonosari, untuk teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* responden dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini yaitu dengan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS 26.0 menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan uji F berpengaruh signifikan dan hasil uji t pada variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan barang milik daerah semua berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan barang milik daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the determination of the quality of local government financial statements at Wonosari Hospital, Gunungkidul Regency, the determination used in this study is the competence of human resources, the use of information technology, and the management of regional property. This study uses quantitative research types with primary and secondary data sources with data collection using questionnaires/google forms distributed to respondents. The population in this study was all employees at Wonosari Hospital, for sampling techniques using purposive sampling respondents were selected according to criteria determined by researchers. Data analysis used to process this research data is descriptive statistical analysis, data quality test using validity test and reliability test, classical assumption test using normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test, for hypothesis testing using multiple linear analysis, F test, t-test, and coefficient of determination (R²) tests. The results of data processing using SPSS 26.0 show that the test results with the F test have a significant effect and the t-test results on the variables of human resource competence, information technology utilization, and management of regional property all have a significant and positive effect on the quality of local government financial statements.

Keywords: *human resource competence, utilization of information technology, management of local property, quality of local government financial statements.*

BAB I

PENDAHULUAN

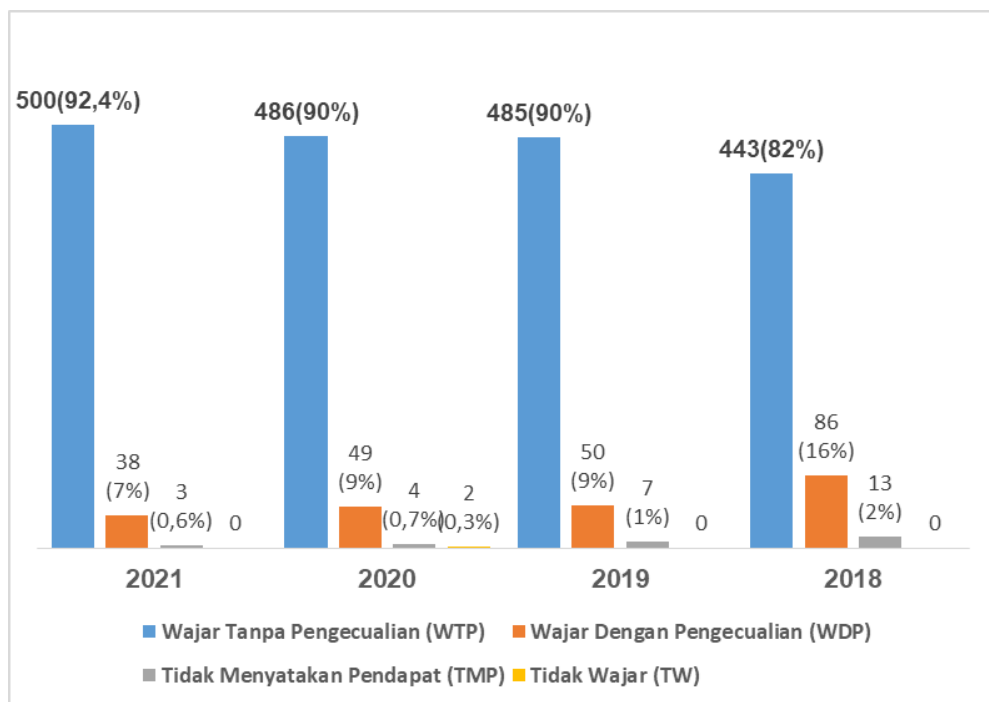
A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pelaporan keuangan di sektor publik ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas keterbukaan informasi atas lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2020) akuntabilitas publik merupakan suatu media informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik yang dilaksanakan dalam satu periodik. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan pemerintah diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah dalam hal ini mewujudkan bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran adalah dengan menyusun laporan keuangan pemerintah prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterima secara umum yang nantinya digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik (Stella, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat

maupun daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi salah satu cermin bahwa pengelolaan keuangan suatu pemerintah dikatakan baik. Pengelolaan keuangan yang baik ini perlu adanya sistem dan prosedur kelembagaan yang mendukung terciptanya kualitas dari laporan keuangan. Oleh karena itu informasi laporan keuangan harus berkualitas, informasi laporan keuangan yang dipublikasikan harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunannya. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik, yang setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari BPK (Febriana, 2021). Terdapat jenis opini/pendapat yang dapat diberikan oleh pemeriksa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Keuangan Negara, yakni opini: opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan, tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD (2018-2021)

Melihat Gambar 1.1 diatas laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2018-2021, menyatakan pada tahun 2018 untuk opini Tidak Wajar (TW) ada 0 LKPD, untuk opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) ada 13 LKPD, untuk Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada 86 LKPD, untuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ada 443 LKPD, pada tahun 2019 untuk opini Tidak Wajar (TW) ada 0 LKPD, untuk opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) ada 7 LKPD, untuk Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada 50 LKPD, untuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ada 485 LKPD, pada tahun 2020 untuk opini Tidak Wajar (TW) mengalami kenaikan menjadi 2 LKPD, untuk opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) ada 4 LKPD, untuk Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada 49 LKPD, untuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ada 486 LKPD, ada kenaikan Tidak Wajar (TW) dari tahun-tahun sebelumnya yang menandakan LKPD masih ada beberapa faktor yang menjadikan LKPD

kurang berkualitas. Pada tahun 2021 untuk opini Tidak Wajar (TW) turun menjadi 0 LKPD, untuk opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) ada 3 LKPD, untuk Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ada 38 LKPD, untuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi 500 LKPD.

Kurangnya kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu kurang berkualitasnya laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan mampu memahami proses akuntansi dan bagaimana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercipta laporan keuangan yang berkualitas (Sundari dan Rahayu, 2019). Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelola keuangan. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimilikinya juga. Laporan keuangan dapat diselesaikan secara cepat dengan adanya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, hal ini terjadi karena telah didukung latar belakang pendidikan yang mumpuni, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, karena kompetensi sumber daya manusia sangat berkaitan dengan faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut selaras dengan penelitian dari Binawati (2022) bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki

satuan kerja subbagian ekonomi/keuangan, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mereka hasilkan, untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2023) bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Alda & Nasution (2022) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sistem untuk memanfaatkan seperangkat alat yang dapat membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyampaikan informasi untuk lebih efektif dan efisien. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 diperbarui Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (PP No.65 Tahun 2010). Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi informasi berbasis sistem. Teknologi informasi yang berupa

hardware, software, dan useware dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu (Indraswari, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan Budiman dkk (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi menurut hasil penelitian Cahyono (2020) menunjukkan bahwa peran pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan pemanfaatan teknologi informasi di seluruh OPD Kabupaten Gunungkidul, Pemkab Gunungkidul menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bertujuan untuk mengolah data transaksi keuangan serta membantu pembuatan laporan keuangan yang lebih baik, SIPKD yang sudah berjalan cukup baik digantikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan munculnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, penggunaan SIPD meliputi pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang diintegrasikan dengan SIPD digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk pelaksanaannya sampai tahun 2022 SIPD belum berjalan dengan baik.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis pada pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik

daerah memerlukan perhatian khusus karena setiap tahun mengalami peningkatan nilai aset tetap yang relatif besar. Sejak ditetapkan kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan daerah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Proses pengelolaan barang milik daerah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diperkuat dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan tersebut ditetapkan pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan barang, penggunaan barang, pemanfaatan barang, pengamanan dan pemeliharaan barang, penilaian barang, pemindahtanganan barang, pemusnahan barang, penghapusan barang, penatausahaan barang, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 Nomor 10A/LHP/XVII.YOG/04.2023 terdapat temuan pengelolaan barang milik daerah seperti pengelolaan persediaan pada tiga OPD belum tertib serta pengelolaan aset tetap belum tertib meliputi penyewaan aset, pencatatan aset tetap dicatat di dua OPD berbeda, pemanfaatan aset, dan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) belum dihapuskan. Berbagai permasalahan pengelolaan BMD menunjukkan bahwa pengelolaan BMD masih belum akuntabel. Untuk memperoleh LKPD yang berkualitas dibutuhkan pengelolaan BMD yang baik.

Untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah harus dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel, karena dipengaruhi oleh kebijakan, proses dan sistem untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait pengelolaan barang milik daerah sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Fitria dkk (2022) pada penelitiannya membuktikan bahwa pengelolaan barang milik daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Rumah sakit merupakan unit kerja dari instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (836/MENKES/SK/VI/2005) berisi rumah sakit dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja secara profesional dengan tidak mengabaikan misi sosial yang dimilikinya, mengingat rumah sakit merupakan intuisi pelayanan yang menyerap banyak tenaga kerja, dana dan sarana. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari adalah salah satu dari sekian layanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Gunungkidul, hal ini mendorong Rumah Sakit berkembang dari lembaga sosial menjadi lembaga usaha, namun demikian agar Rumah Sakit umum tetap bertahan dan tumbuh, maka pihak manajemen harus memperhitungkan keuntungan dengan tidak mengurangi fungsi sosialnya, yang menjadi kendala pada rumah sakit masih belum memahami bagaimana sistem akuntansi yang sebaiknya digunakan untuk memenuhi ketentuan yang diharapkan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai karakteristik yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan serta mempunyai manfaat *feedback*, manfaat *predictive*, lengkap dan tepat waktu agar terhindar dari salah saji yang material serta memudahkan penggunaannya membutuhkan hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penuli memiliki tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan pembaca diharapkan dapat memberikan konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik mengenai yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan khususnya RSUD Wonosari. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus menentukan solusi di masa depan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, sumbangan, dan evaluasi bagi RSUD Wonosari, untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan barang milik daerah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik dan tertib.

E. Lingkup Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui hubungan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan barang milik daerah sebagai variabel independen (X) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen (Y). Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul, untuk populasi pada penelitian ini seluruh pegawai RSUD Wonosari. Penelitian ini hanya fokus pada hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan adalah sebuah konsep yang menerangkan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Mardiasmo (2020) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya pada pihak amanah (*principal*) yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Teori keagenan dalam penelitian ini dapat menjelaskan di mana pemerintah daerah khususnya rumah sakit dalam pelaporan keuangan pemerintah bertindak sebagai *agent* dengan kewajiban untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna informasi keuangan pemerintah, memainkan peran kunci dalam menilai akuntabilitas dan keterandalan keputusan secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan mereka. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia serta pengelolaan barang milik daerah

yang harus dijalankan khususnya rumah sakit dalam kegiatan pengelolaan keuangan bahwa RSUD Wonosari sebagai *agent* harus memberikan laporan kepada *principal* atau masyarakat dalam bentuk pelaporan keuangan yang berkualitas.

2. Theory Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini, TAM diperkenalkan pertama oleh Fred D. Davis (1989) menyatakan bahwa tujuan TAM adalah untuk memberikan dasar untuk melacak seberapa pengaruh eksternal terhadap kepercayaan/keyakinan, sikap, dan tujuan pengguna. TAM berpendapat pada 2 (dua) keyakinan individual, yaitu persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (*perceived easy of use*) dan persepsi manfaat teknologi informasi (*perceived usefulness*), adalah pengaruh utama untuk perilaku penerimaan komputer. Kedua persepsi tersebut mempengaruhi penggunaan teknologi sesungguhnya, karena pada umumnya pemanfaatan teknologi informasi memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan, sehingga model TAM dapat digunakan untuk memanfaatkan teknologi serta untuk mempermudah dalam membantu mengolah data keuangan serta dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Persepsi terhadap kegunaan dan persepsi terhadap kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan, dimana TAM bertujuan untuk

mengolah suatu data transaksi, membantu dalam pembuatan laporan keuangan serta agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. TAM digunakan sebagai dasar untuk menentukan hubungan antar persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Febriwati (2021) mendefinisikan kualitas merupakan Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.

Menurut Adawiyah (2022) mendefinisikan laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran bagaimana keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan berdasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada paragraph 35-40 menyebutkan ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang baik:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika informasi di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi kejadian masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi. Informasi yang relevan meliputi hal-hal berikut (SAP Berbasis Akrua: 37):

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*), yakni informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang datang berdasarkan hasil masa lalu dan masa kini.
- c) Tepat waktu, yakni informasi disajikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, yakni informasi yang disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada, sekaligus mengungkapkan informasi utama dengan jelas agar kekeliruan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Keandalan merupakan ciri-ciri yang memungkinkan para pengguna bergantung dan yakin kepada informasi tersebut. Informasi yang andal memenuhi karakteristik (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua: 38):

- a) Penyajian Jujur, informasi menggambarkan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas, informasi ditunjukkan pada khalayak umum dan tidak berpihak pada pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen laporan keuangan pokok pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional (LO), yakni laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

- 5) Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menyajikan informasi berhubungan dengan pendanaan, transitoris, investasi, dan aktivitas operasi yang menjelaskan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno & Zuhri (2019) kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.

Menurut Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pelaksanaan tugas jabatannya,

sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Menurut Paramarta, dkk (2023) sumber daya manusia adalah kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena motivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya.

Menurut Iqbal dkk (2022) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 indikator kompetensi sumber daya manusia (pegawai) adalah:

- 1) Pengetahuan, merupakan informasi yang dipunyai seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang.

- 2) Keterampilan, merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan ide dan gagasannya untuk menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
- 3) Sikap/Perilaku, merupakan respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala resikonya.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pemanfaatan adalah proses atau macam atau perbuatan memanfaatkan. Menurut Juhriyansyah (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang diciptakan dari gabungan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jaringan komunikasi tersebut meliputi video, suara, dan data informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah; teknologi informasi merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Menurut Utami (2021) pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari

kesalahan melakukan posting dari dokumen manual pembantu, sehingga menjadi laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tentang prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

b. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dimensi teknologi informasi menurut Putra *et al.* (2020) penelitian menyatakan teknologi informasi merupakan gabungan dari:

- 1) Teknologi informasi harus dapat melaksanakan tugas-tugas yang sering dilakukan oleh teknologi, seperti menyimpan data atau memproses pekerjaan dengan cepat.
- 2) Kapasitas teknologi merupakan kemampuan untuk melengkapi teknologi lainnya.
- 3) Kemampuan pemeliharaan, adalah kemampuan bertahan sewaktu-waktu dengan melakukan pemeliharaan secara berkala.

Pemanfaatan teknologi informasi penelitian Ferliani *et al.* (2020) menggunakan 5 (lima) dimensi pengukuran sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan *Input technology* adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer, yang terdiri dari scanner, keyboard, dan mouse.
- 2) Pemanfaatan *Output technology* adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem, yang terdiri dari monitor, printer, dan infocus.
- 3) Pemanfaatan *software technology* adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna komputer itu sendiri, yang terdiri dari Ms. Office, dan program aplikasi akuntansi.
- 4) Pemanfaatan *Storage technology* adalah teknologi kolektif yang menangkap dan menyimpan informasi digital pada media penyimpanan berbasis elektromagnetik, optik, atau silikon, yang terdiri dari internet, intranet, LAN, dan WAN.
- 5) Pemanfaatan *Processing machines* adalah teknologi mesin pengolah, seperti Central Processing Unit (CPU).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna informasi untuk melaksanakan untuk mendukung pemrosesan transaksi data dan pembuatan penyusunan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim & Yenny, 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Sihite (2020) menerangkan bahwa aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak beserta bagian-bagian tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang, dan dinilai termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Barang milik daerah termasuk aset lancar dan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan pada kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual untuk operasi normal entitas, dan dibangun atau diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan. Aset tetap daerah merupakan bagian utama pada aset pemerintah yang memiliki nilai sangat besar pada laporan posisi keuangan (neraca), pengelolaan aset daerah terdapat sistem dan prosedur yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, kepastian nilai, akuntabilitas dan efisien. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

b. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah/pengelolaan aset tetap merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, oleh sebab itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, maupun mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui *planning, organizing, leading, dan controlling* bertujuan mendapat keuntungan dan mengurangi biaya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah meliputi:

1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menentukan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang datang.

2) Pengadaan

Pengadaan yaitu kegiatan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

3) Penggunaan

Penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

4) Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5) Pengaman dan Pemeliharaan

Pengaman adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.

6) Penilaian

Penilaian merupakan kegiatan memberikan suatu pendapat nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada aset tertentu.

7) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

8) Pemusnahan

Pemusnahan merupakan tindakan menghilangkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah.

9) Penghapusan

Penghapusan merupakan tindakan melenyapkan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dengan menerbitkan berita acara keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna yang berada dalam penguasaanya.

10) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian pekerjaan yang meliputi pencatatan, inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap OPD harus melakukan pendataan dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang milik pengguna.

11) Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan.

Pembinaan merupakan suatu usaha pemberian pelatihan, pedoman, supervisi, dan bimbingan. Pengendalian merupakan usaha untuk mengarahkan dan menjamin pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah banyak dilakukan di Indonesia dengan hasil yang berbeda-beda. Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi maupun acuan penulisan skripsi ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fitria <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung	Variabel independen: Penatausahaan Barang Milik Daerah Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung

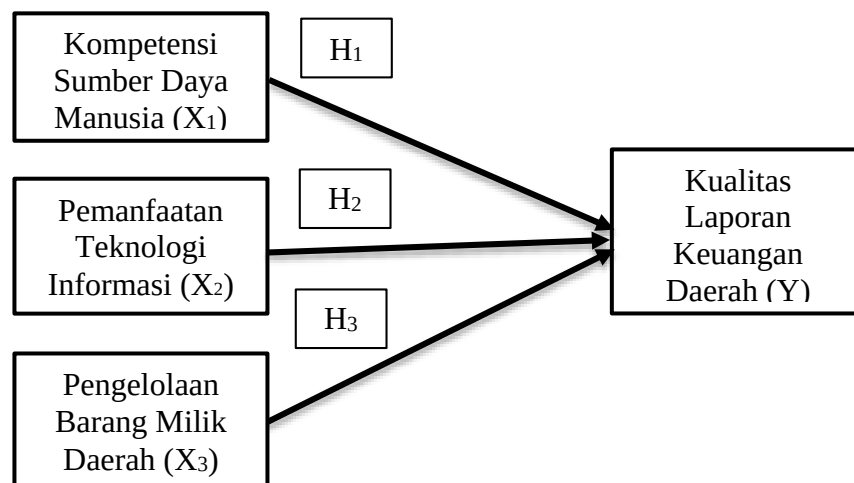
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Binawati & Nindyaingsih (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3	Fathia <i>et al.</i> (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating	Variabel independen: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Moderasi: Komitmen Organisasi	Hasil penelitian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Komitmen Organisasi memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, tidak dapat memoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4	Irfansyah & Septariani (2022)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Variabel independen: Penatausahaan BMD Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan Penatausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Kusnadi <i>et al.</i> (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel independen: Kompetensi A.P, Pemanfaatan TI, Pengawasan Keuangan Pemerintah Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6	Budiman <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi	Variabel independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel moderasi: Sistem Pengendalian Intern	Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern tidak mampu memoderasi Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
7	Ningrum (2018)	Pengaruh Kompetensi Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Variabel independen: Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Prasetya ningrum (2021)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Variabel independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
9	Subrata <i>et al.</i> (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Variabel independen: Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel dependen: Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Daerah
10	Mukharofah & Kaukab (2022)	Peran Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo	Variabel independen: Perencanaan BMD, Penilaian BMD, Penatausahaan BMD, Pengawasan dan Pengendalian BMD, Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola BMD Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Perencanaan BMD, Penilaian BMD, Pengawasan dan Pengendalian BMD, Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola BMD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk Penatausahaan BMD tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019), Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan pertautan antar variabel independen dengan variabel dependen penelitian. Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar skema kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini mempunyai 3 (dua) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen yang dapat dilihat seperti di bawah ini:

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₃ : Pengelolaan Barang Milik Daerah

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia haruslah memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas, hubungan penerapan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dimana kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan dengan pihak *agent* yang merupakan pihak pembuat laporan keuangan, seperti telah mengerti/paham dengan peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi pemahaman akuntansi yang semestinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, mendapatkan pelatihan/pendidikan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan serta mempunyai pengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Kelemahan kompetensi sumber daya manusia untuk memahami dan menerapkan SAP berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat, sehingga menjadikan laporan keuangan kualitasnya menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, berdampak meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah yang dihasilkan. Sumber daya manusia dikatakan berkualitas jika mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan berbekal pendidikan, latihan, dan cukup pengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Binawati dkk, (2022); Nurul, dkk (2020); Budiman, dkk, (2023) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan sebuah hipotesis:

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi pada pengelola keuangan haruslah bisa dan paham menggunakan sistem komputer, sehingga mempermudah pengelolaan data transaksi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dan disajikan sistem informasi terstruktur dan lebih cepat dan akurat. Hubungan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), menurut teori TAM dalam hal pemanfaatan teknologi informasi pihak pengelola keuangan haruslah bisa dan paham dalam memanfaatkan serta menggunakan sistem komputer, sehingga mempermudah dalam pengelolaan data transaksi keuangan serta laporan yang dihasilkan dan disajikan dalam sistem informasi terstruktur, lebih

cepat, dan akurat. Berdasarkan teori TAM, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana dengan bantuan/memanfaatkan alat teknologi yang canggih seperti perangkat *Input Technology*, *Output Technology*, *Software*, *Storage Technology*, *Processing machines*.

Kelemahan pemanfaatan teknologi informasi dalam menggunakan teknologi untuk membantu pembuatan laporan keuangan akan berdampak keterandalan serta ketidaktepatwaktuan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga dalam pengumpulan laporan keuangan mengalami keterlambatan yang membuat laporan keuangan dipertanyakan. Pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk membantu mengolah data transaksi keuangan yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan, maka pelaksanaan pembuatan laporan keuangan lebih efisien dan lebih tepat waktu untuk penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan dan keterandalan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningrum (2021), Binawati, dkk (2022) menunjukkan hasil yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji penelitian ini adalah:

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan barang milik daerah menjadi salah satu pos strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan nilai yang meningkat setiap tahunnya. Hubungan penerapan pengelolaan barang milik daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori agensi, menurut teori keagenan (*agency theory*) dalam hal pengelolaan barang milik daerah pihak *agent* sebagai pembuat laporan keuangan harus paham tentang pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah dimana ada 11 (sebelas) kegiatan pengelolaan BMD seperti Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang yang dikerjakan apabila ada penyimpangan bisa menjadikan temuan BPK, serta sebagai dasar penyusunan neraca di laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan dengan baik dan benar dimana harus disesuaikan dengan keadaan fisik di lapangan yang setiap tahunnya menjadi dasar pemeriksaan BPK, apabila pengelolaan BMD baik dan benar maka bisa menjadikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Kelemahan pengelolaan barang milik daerah dalam mengelola BMD untuk pembuatan laporan keuangan akan berdampak pada nilai neraca di laporan keuangan menjadikan tidak andal serta laporan BMD sebagai dasar nilai neraca tidak cocok antara fisik BMD dengan laporan BMD,

sehingga pembuatan laporan keuangan mengalami kurang andal. Pengelolaan barang milik daerah diperlukan untuk mengelola BMD agar data BMD bisa digunakan dalam neraca pembuatan laporan keuangan, neraca OPD yang sudah dibuat tadi akan dijadikan dasar untuk membuat neraca pemerintah daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari OPD ke pemerintah daerah dan juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah dipercaya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, baik buruknya pengelolaan barang milik daerah mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini atas laporan keuangan. Penelitian Fitria, dkk (2022), dan Mukharofah, dkk, (2022) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengelolaan aset daerah terhadap laporan keuangan.

H₃: Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah RSUD Wonosari di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan apabila kompetensi sumber daya manusia meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga meningkat dan sebaliknya. Berkualitas tidaknya laporan keuangan pemerintah daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat kompetensi sumber daya manusia dengan melihat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja setiap pegawai untuk penyajian/pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia di RSUD Wonosari sudah sangat memadai hal penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pemanfaatan teknologi informasi di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga meningkat dan sebaliknya. Berkualitas tidaknya laporan keuangan pemerintah daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan teknologi informasi dengan melihat pemanfaatan jaringan internet, pemanfaatan *software*, pemanfaatan *hardware*, dan pemanfaatan *brainware* proses penyusunan/penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi di RSUD Wonosari sangat memadai untuk membantu proses penyusunan dan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah
3. Pengelolaan barang milik daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan apabila pengelolaan barang milik daerah menjadi salah satu faktor berkualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Berkualitas tidaknya laporan keuangan pemerintah daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pengelolaan barang milik daerah dengan melihat banyak faktor yang sudah berjalan dengan baik seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemusnahan, penatausahaan, dan pengawasan, pengendalian yang membuat nilai-nilai di neraca akurat yang berdampak laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian, beberapa hal yang dapat peneliti sarankan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Manajemen RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu:
 - a. Memberikan seminar, sosialisasi, bimbingan pelatihan teknis, diklat serta forum-forum terbuka di bidang keuangan atau pengelolaan barang milik daerah, ataupun teknologi informasi untuk penyusunan laporan keuangan, pengurus barang, operator SIPKD/SIPD, operator SIM Aset/Persediaan, untuk menambah pengetahuan, keterampilan agar laporan keuangan pemerintah daerah lebih berkualitas.
 - b. Pemberian insentif kepada penyusun laporan keuangan, pengurus barang, operator SIM Aset/Persediaan dan operator SIPKD/SIPD.
 - c. Meskipun pengelolaan barang milik daerah sudah berjalan dengan baik, untuk menambah sumber daya manusia yang berkompeten karena melihat nilai aset yang besar butuh sumber daya manusia yang lebih.
 - d. Membuat aplikasi internal yang berintegrasi antara keuangan dan pengelolaan barang milik daerah untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyarankan untuk memberikan bimtek/pelatihan mengenai aplikasi Kemendagri SIPD yang belum berjalan, serta membuat kebijakan tentang adanya tumpang tindih penggunaan aplikasi Pemda dengan aplikasi Kemendagri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, beberapa yang dapat disarankan untuk menyebarkan kuesioner pada waktu dan tempat yang melibatkan semua responden sehingga dapat membantu responden untuk pengisian, menambahkan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada responden, dan menambahkan variabel-variabel lain yang belum digunakan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Ais Robiatul. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. 15(2). 465-474. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.834>
- Alda, Fahimah, and Juliana Nasution. (2022). Pengaruh Kompetensi ASN, Kedisiplinan ASN, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Medan (Study Kasus pada BPKAD Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 6(1). 3788-3793.
- Binawati, Enita, and Cyrenia Tri Nindyaningsih. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*. 19(1). 19-39. <https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/213/157>
- Budiman, M. Arif, Joko Setyadi, and Abdul Gafur. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal KINERJA*. 20(3). <https://doi.org/10.30872/jkin.v20i3.13926>
- Cahyono, Dwi. (2020). Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. *International Journal OF Social Science AND Business*. 4(1). 116-122. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.24068>
- Dalle, Juhriyansyah, and A. Akrim. "Baharuddin. (2020)." *Pengantar Teknologi Informasi*. Depok: Rajawali Pers 334.
- Davis, F.D. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly. Vol. 113 No. 5: pp319-339
- Fathia, Nurul, Amries Rusli Tanjung, and Novita Indrawati. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal PEKBIS*. 12(1).
- Febriana, H., Rismanty, V. A., Bertuah, E., Anismadiyah, V., Sembiring, L. D., Dewi, N. S., & Dewi, I. K. (2021). Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan. *Bandung: Media Sains Indonesia*.

- Febriwati, Annisa. (2021). Kualitas Pelayanan Dalam Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) di Kantor Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas ISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*.
- Ferliani, Nurul, Elly Halimatusadiah, and Magnaz Lestira Oktaroza. (2020). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Kompetensi Pengguna terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. *Prosiding Akuntansi*. 528-532.
- Fitria, Silvi, Khaerul Umam, and Ai Siti Farida. (2022). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 8(4). 826-844. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2853>
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Cetakan VI). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutapea, Parulian, & Toha Nurianna. (2008). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, Presiden Republik. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Indraswari, Nafadhila Eka, and Yuliasuti Rahayu. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 10(4).
- Iqbal, Muhammad, Syifa Vidya Sofwan, and Rofi Mariam. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*. 13(1). 1-15. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/754>
- Jensen, M. C., dan Meckling, W.H. 1976. *Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure*. *Journal of financial economics*, 3(4). 305-360.
- Irfansyah, Ahmad, and Jumania Septariani. "Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 6.1 (2023): 65-83.

- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Kusnadi, Andi, Fahmi Oemar, and Bambang Supeno. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sains Akuntansi dan Keuangan*. 1(1). 51-63. <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>
- Laurenza, Stella. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. *Skripsi Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Lestari, Intan Novrika, and Lilis Ardini. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 12(9).
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Menteri Dalam Negeri, (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Mukharofah, Mukharofah, and M. Elfan Kaukab. (2022). Peran Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah*. 2(4). 32-52.
- Ningrum, Khoirina Kencana. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*. Skripsi Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

- Nuryanto, Muhammad, and N. Afiah. (2013). *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province – Indonesia)*. World Review of Bussiness Research Vol. 3. No. 4 November 2013 Issue. Pp. 157-171.
- Oktaviyanti, P. M., Herawati, N. T., AK, S., Atmadja, A. T., & SE, A. (2017). Pengaruh pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya etis organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus koperasi simpan pinjam di kecamatan buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.11333>
- Paramarta, V., Palenewen, A. A. P., Linelejan, H. N., Firdaus, F., & Kolibu, D. (2023). Peran Sumber Daya Manusia Dalam Proses Transformasi Organisasi Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, 3(2), 88-95. <https://doi.org/10.55606/jikki.v3i2.1646>
- Pemerintah, Komite Standar Akuntansi. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP.
- Prasetyaningrum, Yunita Tri. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. *Jurnal EBISTEK*. 3(1). 2721-4435.
- Putra, Junialdi Eka, Ruhul Fitrius, and Rheny Afriana Hanif. (2020). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Pengguna Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Serta Dampaknya Pada Kualitas Informasi Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi*. 12(1). 1-11. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i1.2555>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142. 1-66.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Legalitas.

Salim, Peter, and Yenny Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Subrata, I. Wayan, Gerianta Wirawan Yasa, and Ida Bagus Putra Astika. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. 7(2). 477.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sundari, Heni, and Sri Rahayu. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *eProceedings of Management*. 6(1).

Sutrisno, Sutrisno, and Muhammad Saifuddin Zuhri. (2019). PKM Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas. *Journal of Dedicators Community*. 3(1). 53-61.

Utami, Helen Putri. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. *Skripsi Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Widodo, Eko Suparno. (2015). *Manajemen SDM*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Penelitian akademis kami berjudul “Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul”, kami sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini agar diisi mengenai kondisi atau fakta yang terjadi berdasarkan perspektif profesional sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.

BAGIAN 1: KARAKTERISTIK RESPONDEN

Berikut ini ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr:

1. Nama (wajib diisi) :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
4. Pendidikan terakhir/jurusan : a. SMA b. D3 c. S1
d. S2 e. Lainnya
5. Jabatan :
6. Masa Kerja : a. 0-5 Tahun b. 6-10 Tahun
c. 11-15 Tahun d. > 16 Tahun
7. Kursus/Bimtek/Diklat : a. Tidak Pernah
dibidang keuangan/ b. Minim Sekali
pengelolaan barang milik c. Sering
daerah yang pernah diikuti: d. Sering Sekali

BAGIAN II: PETUNJUK PENILAIAN

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Mohon untuk melengkapi identitas responden dengan benar.
2. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pilihan, yang penting memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat anda hanya boleh diisikan satu jawaban.
3. Pada bagian ini, Bapak/Ibu/Sdr dimohon memilih tanda lingkaran (●) pada salah satu jawaban yang anda pilih, yang menurut anda tepat dan atau sesuai dengan kondisi kerja saat ini.
4. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan,
 - a. Sangat Setuju (SS)
 - b. Setuju (S)
 - c. Cukup Setuju (CS)
 - d. Tidak Setuju (TS)
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS)

BAGIAN III: PERNYATAAN DATA

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

No	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Pegawai yang berkaitan dengan keuangan harus memiliki pengetahuan terhadap peraturan dan standar pelaporan keuangan mempengaruhi kualitas informasi dari laporan keuangan					
2	Pegawai yang berkaitan dengan keuangan harus sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-Upgdrade pengetahuan di bidang akuntansi					
3	Pegawai yang berkaitan dengan keuangan harus memahami tugas pokok, fungsi sebagai penyusunan laporan keuangan					
4	Sumber daya manusia pada OPD tempat saya bekerja telah memiliki kemampuan dan mampu menyusun LKPD sesuai SAP					
5	Adanya pelatihan/diklat/seminar keuangan dapat membantu penguasaan dan pengembangan SDM tugas pada bidang keuangan di OPD tempat saya bekerja					
6	Sumber daya manusia pada OPD tempat saya bekerja dapat melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu dengan kualitas kerja yang baik					
7	Pegawai yang berkaitan dengan keuangan yang sudah berpengalaman di bidang akuntansi atau aset, dapat membantu memecahkan masalah dan mengurangi kesalahan bekerja					
8	Pegawai yang berkaitan dengan keuangan harus menjalankan peran dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan secara jelas peraturan daerah					

9	Pegawai harus selalu menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab					
---	--	--	--	--	--	--

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

No	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	OPD tempat saya bekerja telah memiliki kapasitas komputer dan internet yang sangat memadai untuk melaksanakan tugas pelaporan keuangan					
2	OPD tempat saya bekerja jaringan internet dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					
3	Pengolahan data transaksi keuangan di OPD tempat saya bekerja menggunakan software yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku seperti SIPKD/SIPD, SIM Aset, SIM Persediaan					
4	Laporan akuntansi atau aset yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi					
5	OPD tempat saya bekerja proses akuntansi atau aset sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi					
6	Teknologi informasi merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil, berupa laporan keuangan					
7	OPD tempat saya bekerja terdapat jadwal pemeliharaan <i>hardware</i> dan sistem komputer secara teratur serta peralatan yang telah rusak atau usang didata dan diperbaiki tepat pada waktunya agar tidak mengganggu pekerjaan					

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD)

No	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	OPD tempat saya bekerja merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk penganggaran saat ini dengan memperhatikan kondisi barang yang sudah ada serta melihat kondisi di masa lalu sebagai dasar melakukan tindakan di masa yang akan datang					
2	OPD tempat saya bekerja melakukan proses pengadaan BMD memperhatikan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel					
3	OPD tempat saya bekerja pengurus barang menerbitkan (BAST) menyerahkan penggunaan barang milik daerah kepada masing-masing pemakai barang/unit-unit penerima					
4	OPD tempat saya bekerja pengurus barang dalam pemanfaatan terhadap BMD yang sudah tidak digunakan tugas pokok dan fungsi organisasi berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah					
5	OPD tempat saya bekerja pengurus barang pengamanan terhadap BMD baik secara administratif, fisik, maupun hukum dan melakukan pencatatan pemeliharaan ke dalam kartu pemeliharaan/perawatan dan membuat laporan pemeliharaan barang di lingkungan OPD					
6	OPD tempat saya bekerja pengurus barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah untuk memperoleh nilai wajar atau nilai pasar dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD					
7	OPD tempat saya bekerja dalam proses pemindahtanganan BMD bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku					

No	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
		5	4	3	2	1
8	OPD tempat saya bekerja pengurus barang membuat usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak berat, hilang, dan sudah tidak digunakan berada dalam penguasaan pengguna barang kepada Kepala OPD					
9	OPD tempat saya bekerja pengurus barang dalam melakukan pencatatan barang milik daerah serta pengadaan barang milik daerah melalui SIM Aset mencakup Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), dan Buku Inventaris (BI), Laporan Mutasi Barang Semesteran dan Laporan Mutasi Barang					
10	OPD tempat saya bekerja pengurus barang dalam melakukan inspeksi untuk memperoleh data/informasi yang akurat tentang barang milik daerah secara berkala 6 bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan serta Sensus BMD setiap 5 tahun sekali hasilnya dilaporkan kepada Kepala OPD					

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLKPD)

No	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Laporan keuangan yang OPD tempat saya bekerja susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (feedback value)					
2	Informasi dalam laporan keuangan di OPD tempat saya bekerja dapat digunakan untuk membantu dalam mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu dan memprediksi kejadian masa yang akan datang					
3	OPD tempat saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu mencakup semua informasi yang dibutuhkan					

	sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan					
4	Laporan keuangan pada OPD tempat saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan					
5	Dalam penyusunan laporan keuangan, OPD tempat saya bekerja telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)					
6	Informasi yang OPD tempat saya bekerja sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya					
7	Informasi keuangan yang disajikan oleh OPD tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
8	Laporan yang OPD tempat saya bekerja buat disusun/disajikan secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami dengan jelas oleh kebutuhan pengguna					
9	Pada OPD tempat saya bekerja, laporan keuangan disajikan dan diterbitkan tepat waktu sesuai periode akuntansi pelaporan					

Keterangan : * OPD = Organisasi Perangkat Daerah
* SIM = Sistem Informasi Manajemen
* BMD = Barang Milik Daerah
* LKPD = Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
* SIPKD = Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
* SAP = Sistem Akuntansi Pemerintahan